



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. MUHAMMAD ARMAND EFFENDY POHAN, M. Si**
Jabatan : **Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Selanjutnya disebut Pihak kesatu

Nama : **MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION**
Jabatan : **Gubernur Sumatera Utara**

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2025

Pihak Kedua,

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Pihak Kesatu,

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Ir. MUHAMMAD ARMAND EFFENDY POHAN, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196602091992031004

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD)	2,9 Nilai/Skor
2	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Persentase kerjasama yang difasilitasi	100%
3	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	75%
		Proposal permohonan belanja hibah yang ditindaklanjuti	75%
4	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu	980 Produk hukum
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan	30 Produk hukum
5	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat	Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan	25 perkara
		Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perindungan HAM	15 Kasus
		Kegiatan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM yang dilaksanakan dan Analisa dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Daerah	12 Kegiatan
6	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	1. Persentase Perumusan Kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%

		2. Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	50%
		3. Perentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	60%
7	Mewujudkan Proses dan Pelayanan/Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang transparan, akuntabel dan terstandar	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%
		Persentase Pemenuhan 17 Standarisasi LPSE	100%
8	Menciptakan Kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kebijakan yang di tetapkan untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20 Kebijakan
		Persentase realisasi fisik dan non fisik perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi	95%
9	Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Indeks Pelayanan Publik	4,35 (A-)
		Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%
		Nilai capaian pelaporan kinerja	100%
10	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Fasillitasi Pelayanan Kerumahtangaan Pimpinan	100%
11	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaat Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	100%
12	Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi materi pimpinan	100%
		Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 357.228.221.181	APBD
2 Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp. 2.287.545.650	APBD
3 Kesejahteraan Rakyat	Rp. 234.208.508.094	APBD
4 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 1.577.752.870	APBD
5 Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.107.093.000	APBD
6 Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 3.091.096.970	APBD
7 Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 602.165.000	APBD
8 Penataan Organisasi	Rp. 2.297.286.101	APBD
Total	Rp. 851.084.736.902	

Medan, 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

GUBERNUR SUMATERA UTARA

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Ir. MUHAMMAD ARMAND EFFENDY POHAN, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196602091992031004